

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Australia telah mengaplikasikan tiga dari empat indikator *soft balancing*. Ketiga indikator tersebut adalah *entangling diplomacy*, *economic strengthening* dan *signals of resolve to balance* telah diaplikasikan untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini sepanjang tahun 2015 hingga 2019.

Aplikasi *soft balancing* didorong oleh kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan domestik dalam mengimbangi negara rival atau potensial menjadi musuh. Dengan demikian berdasarkan konsep *soft balancing* maka Tiongkok dianggap sebagai pemain yang berpotensi menjadi musuh karena berbagai pengaruh yang terjadi baik dari segi keamanan dan militer, bantuan luar negeri dan politik.

Berpotensi menjadi musuh bukan menjadi musuh sesungguhnya juga disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini belum mengancam secara tegas akan posisi Australia sebagai *hegemonic power* di Papua Nugini. Tiongkok belum melakukan tindakan agresif seperti perang atau membangun pangkalan militer di Papua Nugini.

Namun atas dasar teori ancaman Tiongkok (*China Threat Theory*) yang mengagas tentang bahaya Tiongkok yang muncul mulai dari ancaman militer, ekonomi dan lain lain serta fakta bahwa pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang ada dari tahun ke tahun sehingga pengaruh Tiongkok berpotensi mengancam Australia sebagai *hegemonic power* di Papua Nugini. Untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut

maka Australia mengimbangi Tiongkok dengan cara mengaplikasikan *soft balancing* dalam rangka mengimbangi pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019.

Berbagai ancaman Tiongkok yang telah Australia imbangi adalah mulai dari ancaman siber, ancaman hubungan militer antara Tiongkok dan Papua Nugini, ancaman ekonomi dan ancaman kepentingan lainnya atau ancaman tekanan publik kepada pemerintah Papua Nugini untuk mendukung posisi Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Berikut rangkuman aplikasi *Soft Balancing* Australia terhadap pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019.

- Aplikasi *Territorial Denial*

Australia tidak mengaplikasikan *territorial denial* kepada Tiongkok meskipun adanya pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini baik itu pemberian alat militer angkatan darat yang bernilai sebesar USD 5.34 juta (Lowy Institute, 2018) dan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (*Chinese Navy's "Square Boat" hospital ship*) sebagai *ceremonial* untuk menandai hubungan militer antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018) (Motegi, 2019).

- Aplikasi *Entangling Diplomacy*

Australia mengaplikasikan *entangling diplomacy* disebabkan oleh pengaruh Tiongkok dari segi politik. Pengaruh tersebut terjadi pada tahun 2016 ketika

pemerintah Tiongkok melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Sehingga Papua Nugini pun mendukung Posisi Tiongkok dalam sengketa laut Tiongkok Selatan.

Padahal, aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan memasuki tahap yang membahayakan seperti pembangunan kontruksi yang menciptakan bentrokan dengan berbagai pihak. Bentrokan dengan berbagai pihak tersebut yakni nelayan, penjaga pantai dan kerusakan aset laut. Dengan demikian Australia yang mendukung tatanan global berdasar hukum di Indo-Pasifik mengalami tekanan yang signifikan.

Dengan demikian, Australia melakukan *entangling diplomacy* dengan menggunakan norma institusi untuk menunda, memperumit dan mencegah ambisi Tiongkok Laut Tiongkok Selatan dengan cara mengumumkan pernyataan bersama dengan dua negara lain, AS dan Jepang. Pernyataan tersebut bersisi desakan agar Tiongkok mematuhi keputusan arbitrase Konfensi PBB tentang hukum laut (*UNCLOS*) tahun 2016.

- Aplikasi *Economic Strengthening*

Australia mengaplikasikan *economic strengthenig* disebabkan oleh pengaruh bantuan luar negeri Tiongkok kepada Papua Nugini dan pengaruh keamanan. Berbagai bantuan yang telah diberikan sejak tahun 2015-2018.

Sehingga untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut adalah dengan melaksanakan program *Seasonal Workers Program* sebagai wujud dari pembentukan blok perdagangan tanpa adanya Tiongkok di dalamnya.

Aplikasi lain yang dapat dikategorikan sebagai *economic strengthening* adalah pengaruh Tiongkok dari segi keamanan. Keikutsertaan Huawei dimana perusahaan yang dilarang beroperasi di Australia kini membangun sebuah *National Broadband Network* di Papua Nugini.

Sehingga bentuk *Economic Strengthening* Australia untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok adalah membangun kerjasama Sistem Kabel Laut Koral (*Coral Sea Cable System*). Kerjasama ini masuk dalam indikator *Economic Strengthening* karena kerjasama hanya dianggotai oleh tiga negara yakni Australia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon tanpa Tiongkok.

Selain itu, Australia juga mengimbangi ancaman Tiongkok dari segi Pengaruh ekonomi yakni hubungan ekspor, impor dan investasi. Sehingga untuk mengimbangnya, secara bilateral Australia dan Papua Nugini telah membangun sebuah blok perdagangan tanpa Tiongkok dimana Australia meningkatkan hubungan ekspor, impor dan investasi di Papua Nugini lebih banyak dibandingkan hubungan ekspor, impor dan investasi Tiongkok di Papua Nugini.

Selain pengaruh ekonomi, ternyata pengaruh Tiongkok dari segi proyek infrastruktur juga dapat melahirkan upaya *economic strengthening*. Berbagai proyek infrastruktur baik yang sudah selesai dan dalam proses pembangunan. Maka *economic*

strengthening Australia adalah bekerjasama dengan AS dan Jepang dengan membentuk Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik (*Trilateral Partnership for Infrastructure investment in the Indo-Pacific*). Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik memiliki mandat untuk memajukan pembangunan infrastruktur yang memberdayakan masyarakat dan mematuhi standar global dan meningkatkan peluang ekonomi.

- Aplikasi *Signals of Resolve to Balance*

Aplikasi *signals of resolve to balance* Australia dalam mengimbangi Tiongkok disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini dari segi keamanan dan ekonomi. Pengaruh keamanan Tiongkok di Papua Nugini seperti pemberian bantuan peralatan militer kepada Papua Nugini pada tahun 2017 dan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok di Papua Nugini dan juga pengaruh operasi kapal non militer yang melintasi laut diantara pangkalan militer Lombrum dan pangkalan militer angkatan laut AS di pulau Guam merupakan berbagai pengaruh dari segi keamanan.

Maka Australia mengaplikasikan *signals of resolve to balance* adalah dengan bekerjasama dengan negara lain yakni AS. Berdasarkan penggambaran kerjasama tersebut, penulis menganalisis bahwa ancaman Tiongkok di respon oleh kegiatan *signals of resolve to balance* oleh Australia dan AS melalui komitmen mereka bekerjasama sama dalam pengembangan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus, Papua Nugini. Hal ini dapat disesuaikan dengan defenisninya bahwa jika beberapa negara dapat bekerja sama, dan berulang kali maka dapat meningkatkan

kepercayaan antar mereka dalam rangka untuk melawan ambisi pemimpin negara lawan.

Untuk memperkuat analisis *signals of resolve to balance*, Australia bersama negara lain yakni AS dan negara *second ranked powers* yakni Jepang dan Papua Nugini melakukan *soft balancing* secara berulang ulang. Kerjasama tersebut dapat ditinjau dari upaya Australia dan AS terhadap pembangunan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum. Selain itu, Upaya Australia, AS dan Jepang dalam melakukan *entangling diplomacy* dengan menggunakan ASEAN sebagai *manuver* diplomatik dalam rangka mengimbangi posisi Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Australia dan Papua Nugini dan Kepulauan Solomon membangun sebuah blok perdagangan melalui *Seasonal Workers Program*. Dan, AS dan Jepang turut bekerjasama dengan Australia untuk mengimbangi Pengaruh Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini melalui Kerjasama Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini hanya membatasi studi kasus terhadap Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang berpotensi mengancam Australia. Penelitian dengan cakupan mulai dari 2015-2019 dengan dua rezim pemerintahan yakni mantan PM Malcolm Turnbull pada tahun 2015-2018 dan awal pemerintahan PM Scott Morrison pada tahun 2019. Dengan demikian untuk mengimbangi negara yang berpotensi mengancam maka penelitian ini menganalisis segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia menggunakan konsep *Soft Balancing* oleh Robert A. Pape.

Namun, penelitian ini memiliki kekurangan. Sehingga penulis memberikan saran dan rekomendasi agar penelitian selanjutnya dapat meneliti aplikasi *Soft Balancing* Australia terhadap pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada masa selain 2015-2019 atau selain rezim PM Malcolm Turnbull dan Scott Morrison. Terutama meneliti aplikasi *soft balancing* pada masa rezim yang dipegang oleh Partai Buruh. Karena setiap rezim yang dipimpin oleh rezim partai buruh atau liberal memiliki perbedaan dalam mengeluarkan setiap kebijakan luar negeri.